


# HUKUM LINGKUNGAN

di Indonesia

Edisi Kedua

PROF. DR. TAKDIR RAHMADI, S.H., LL.M.

		<b>PERPUSTAKAAN</b>	
No. INV.	061/mhk/19/C-1		
Th. Angg.	2019	Cat C-1	
PARAP	Bm	TGL	17/07/2019



RAJAWALI PERS  
Divisi Buku Perguruan Tinggi  
PT RajaGrafindo Persada  
DEPOK



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas	vii
KATA PENGANTAR	xi
KATA PENGANTAR PENULIS EDISI KEDUA	xiii
<b>BAB 1 LATAR BELAKANG PENGEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN</b>	<b>1</b>
A. Masalah-masalah Lingkungan	
Sebagai Pendorong	1
1. Kesehatan	3
2. Estetika	4
3. Kerugian Ekonomi	4
4. Terganggunya Ekosistem Alami	4
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Masalah-masalah Lingkungan	5
1. Teknologi	5
2. Pertumbuhan Penduduk	5
3. Motif Ekonomi	6
4. Tata Nilai	7
C. Lahirnya Kesadaran Lingkungan dan Kebijaksanaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan di Tingkat Global dan Regional	8

1.	Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup	8
2.	Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan	9
3.	Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)	18
4.	Visi Bersama Peradilan ASEAN tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup	20
D.	Pengertian dan Pembidangan Hukum Lingkungan	21
E.	Posisi Hukum Lingkungan Dalam Konteks Ilmu Hukum	23
F.	Teori-teori Pengembangan Hukum Lingkungan	24
1.	Pengembangan Hukum Lingkungan Berdasarkan Teori Pendekatan Ekonomi	24
2.	Pengembangan Hukum Lingkungan Berdasarkan Teori Hak	28
3.	Pengembangan Hukum Lingkungan Berdasarkan Teori Paternalisme	33
4.	Pengembangan Hukum Lingkungan Berdasarkan Teori Nilai Kebijakan Publik	35
<b>BAB 2</b>	<b>PENGATURAN ASAS, HAK DAN KEWAJIBAN, KEWENANGAN, KELEMBAGAAN, DAN INSTRUMEN DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>37</b>
A.	Pengembangan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan	37
1.	Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Klasik	37
2.	Sejarah Singkat Pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982	38
3.	Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997	

	dan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 ke Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	41
B.	Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Beberapa Pengertian Konsep Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	43
C.	Asas dan Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	51
	1. Asas	51
	2. Tujuan	51
D.	Hak-hak dan Kewajiban	53
	1. Pengakuan atas Hak-hak Lingkungan Hidup	53
	2. Kewajiban-kewajiban Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	56
E.	Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	57
F.	Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	62
	1. Instansi-instansi Sektoral	62
	2. Dari Kementerian Lingkungan Hidup ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	63
	3. Kelembagaan Pengendalian Perubahan Iklim	67
	4. Kelembagaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota	69
	5. Tingkat Kabupaten/Kota	71
G.	Instrumen Pengelolaan Lingkungan Hidup	73
	1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	74
	2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis	74
	3. Baku Mutu Lingkungan Hidup	76
	4. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup	77
	5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	78
	6. Izin Lingkungan	94
	7. Audit Lingkungan	104

8.	Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	111
9.	Analisis Risiko Lingkungan	112
<b>BAB 3</b>	<b>PENGATURAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>115</b>
A.	Pengantar	115
B.	Baku Mutu Lingkungan Hidup	116
C.	Perizinan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Sebelum Berlaku UUPPLH	117
1.	Izin Usaha Industri	118
2.	Izin Lokasi	121
3.	Izin Hinder Ordonantie (HO)	121
4.	Izin Pembuangan Air Limbah	122
5.	Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi pada Tanah	122
6.	Izin Dumping	123
7.	Izin Pengoperasian Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	123
D.	Izin Pengendalian Pencemaran Lingkungan Berdasarkan UUPPLH	124
E.	Pengendalian Pencemaran Air	124
1.	Pengertian tentang Konsep-konsep	125
2.	Kewenangan Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	126
3.	Pengawasan dan Pemantauan	127
4.	Kewajiban-kewajiban Penanggung Jawab Usaha	128
5.	Sanksi-sanksi	128
F.	Pengendalian Pencemaran Udara	130
1.	Pengertian tentang Konsep-konsep	130
2.	Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Berdasarkan PP No. 41 Tahun 1999	131

3.	Pengendalian Pencemaran Udara Berdasarkan PP Nomor 4 Tahun 2001	133
4.	Instansi Pemerintah yang Berwenang	134
G.	Pengendalian Pencemaran Laut	136
1.	Pengaturan	136
2.	Instansi Pemerintah yang Berwenang	136
H.	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	137
1.	Pengaturan	137
2.	Instrumen-instrumen	139
3.	Instansi-instansi Pemerintah yang Berwenang	139
I.	Perizinan Berdasarkan Pendekatan Ekonomi	139
J.	Penurunan Gas Rumah Kaca Dalam Rangka Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim	145
1.	Masalah Perubahan Iklim dan Tanggapan Masyarakat Dunia	145
2.	Pengaturan Tingkat Nasional	149

**BAB 4 PENGATURAN PEMANFAATAN SUMBER  
DAYA ALAM DAN PENGENDALIAN  
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** 157

A.	Pengantar	157
B.	Pengelolaan Hutan	157
1.	Pengaturan	157
2.	Pengertian Hutan, Asas dan Tujuan Pengelolaan Hutan	158
3.	Pemanfaatan Hutan dan Kawasan Hutan Produksi	160
4.	Rehabilitasi, Reklamasi dan Perlindungan Hutan	166
5.	Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	170

6.	Polisi Kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dan Satuan Pengamanan Kehutanan	175
C.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	176
1.	Pengertian tentang Konsep-konsep	176
2.	Asas, Tujuan dan Strategi	177
3.	Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan	177
4.	Pengawetan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan dan Satwa Beserta Ekosistemnya	178
5.	Pemanfaatan Sumber Daya Alam Secara Lestari	178
6.	Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	179
7.	Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik	181
D.	Perlindungan Sumber Daya Alam Hayati di Laut	184
1.	Pengertian-pengertian	184
2.	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Laut	185
3.	Izin Penangkapan Ikan di ZEE	185
E.	Perlindungan Sumber Daya Ikan	186
1.	Pengertian-pengertian	186
2.	Pelestarian Sumber Daya Ikan	186
F.	Pengelolaan Sumber Daya Air	187
1.	Arti Penting Air Tawar	187
2.	Perdebatan Seputar Pengundangan UU Nomor 7 Tahun 2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XI/2013	188
3.	Materi Muatan Undang-Undang Sumber Daya Air	190

<b>BAB 5</b>	<b>PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN</b>	
	<b>DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN</b>	<b>199</b>
A.	Pengertian dan Lingkup Penegakan Hukum Lingkungan	199
B.	<i>Environmental Rule of Law</i> : Menegakkan Hukum Lingkungan	200
	1. Mengapa Perlu <i>Environmental Rule of Law</i> ?	201
	2. Apakah <i>Environmental Rule of Law</i> ?	204
	3. Teori-teori Kepatuhan Hukum	210
C.	Program Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup	212
D.	Hukum Lingkungan Administrasi	215
	1. Pengawasan	215
	2. Sanksi-sanksi Hukum Lingkungan Administrasi	218
	3. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Gugatan Tata Usaha Negara	224
E.	Hukum Lingkungan Pidana	225
	1. Delik Lingkungan Hidup	225
	2. Delik Lingkungan Hidup Dalam UU Nomor 32 Tahun 2009	228
	3. Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990	236
	4. Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984	238
	5. Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999	238
	6. Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985	241
	7. Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013	244
	8. Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha	253

9.	Pertanggungjawaban Pidana Badan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan di Belanda	258
10.	Pertanggungjawaban Pidana Badan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan di Amerika Serikat	260
11.	Penyidik Tindak Pidana Lingkungan Hidup	263
F.	Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Gugatan Perdata	265
G.	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	270
H.	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009	272
1.	Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan	272
2.	Gugatan Perwakilan	274
3.	Peran Saksi Ahli Dalam Pembuktian Perkara Lingkungan Hidup	286
4.	Pilihan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	287
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	291
	<b>LAMPIRAN</b>	297
	<b>BIODATA PENULIS</b>	301